

MASUK PROGRAM STRATEGIS 2024

Gerakan Penanganan Sampah Jadi Program Jangka Panjang

YOGYA (KR) - Sejak awal tahun ini gerakan penanganan sampah sudah digulirkan melalui zero sampah anorganik. Gerakan tersebut akan menjadi program jangka panjang karena terkait dengan pembentukan karakter di masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogya 2024, gerakan penanganan sampah masih menjadi program strategis. "Tema RKPD tahun 2024 yakni penguatan kualitas sumber daya manusia untuk keberlanjutan pembangunan Kota Yogya. Tema ini tentunya mendukung isu strategis 2024 yakni pengelolaan persampahan," tandasnya, Kamis (23/3).

Selain penanganan sampah, sejumlah program lain juga masuk dalam isu strategis. Antara lain branding kawasan, sumber daya manusia berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, peningkatan ekonomi, kualitas lingkungan yang lebih baik

serta proses demokrasi pergantian kepala daerah dan legislatif. Isu strategis tersebut selanjutnya menjadi prioritas dalam proses penentuan alokasi anggaran pada tahun depan.

Agus menjelaskan, pengelolaan sampah menjadi isu penting karena belum terintegrasi pengelolaan antara sisi hulu dan hilir termasuk harmonisasi aspek teknis dan finansial. Hal ini diperlukan strategi pengurangan atau penanganan sampah di sisi hulu sehingga dapat mengurangi timbunan sampah di TPA. Oleh karena itu strategi pengurangan di sisi hulu yang ditempuh oleh Pemkot Yogya adalah melalui gerakan zero sampah anorganik dan nantinya akan dikembangkan. Gerakan tersebut merupakan pengurangan sampah residu dan pen-

olahan sampah anorganik yang dicanangkan awal tahun 2023. "Program ini menjadi program jangka panjang karena terkait dengan pembentukan karakter pembentukan kesadaran dan mindset masyarakat untuk membudayakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya," tandasnya.

Jika persoalan sampah sudah terurai serta masyarakat memiliki budaya baru dalam mengelola sampah, maka daya saing wilayah yang berkaitan dengan sumber daya manusia akan lebih mudah terdorong. Hal ini karena dalam beberapa tahun belakangan persoalan sampah kerap menjadi masalah berulang di Kota Yogya. Terutama ketika TPA Piyungan menghentikan aktivitas penerimaan maupun bongkar muat sampah. Akibatnya tumpukan sampah yang terjadi di Kota Yogya tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan melainkan juga estetika kawasan. Apalagi pada tahun depan TPA Piyungan akan dilakukan pengembangan sehingga tidak akan meneri-

ma pasokan sampah dalam tempo lama.

Di samping itu, sampah juga telah menjadi hak dasar masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak terbebani oleh persoalan sampah maka produktivitasnya akan semakin mudah digenot. "Program penanganan sampah itu pun selaras dengan isu strategis RKPD Kota Yogya 2024," katanya.

Sementara dalam pelaksanaan RKPD Kota Yogya 2024, Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, berharap semua pimpinan dan aparat di perangkat daerah serta seluruh stakeholder agar berpikiran terbuka. Selain itu memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif serta mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. "Harapannya penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Yogya secara tepat dan strategis," urainya. **(Dhi)-f**

JALIN MOU DENGAN KPU KOTA YOGYA Mu'allimin Siap Ikut Sukseskan Pemilu 2024



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran KPU Kota Yogya bersama perwakilan Mu'allimin menandatangani naskah kerja sama.

YOGYA (KR) - Madrasah Mu'Allimin Muhammadiyah Yogyakarta siap turut serta mensukseskan gelaran Pemilu 2024. Kesiapan Mu'Allimin tersebut dibuktikan dengan penandatanganan kerja sama atau MoU dengan KPU Kota Yogya.

Kerja sama yang dibangun antara Mu'allimin dengan KPU Kota Yogya berkaitan dengan pendaftaran pemilih serta TPS mandiri di lembaga pendidikan setempat.

"Kesepakatan yang dibangun itu menunjukkan bahwa Mu'allimin memiliki kepedulian terhadap kelancaran pesta demokrasi di Indonesia berupa pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang," ungkap Kepala Humas Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta Ust Yusup Siradz, Rabu (22/3).

Menurutnya, siswa Mu'allimin sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan sistem sekolah asrama dengan jenjang pendidikan enam tahun atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA), maka banyak siswa yang bakal menjadi pemilih pemula. Terutama siswa yang pada saat pemungutan suara sudah berusia 17 tahun.

Oleh karena itu seluruh potensi pemilih pemula tersebut secara aktif disuguhkan ke KPU Kota Yogya. Kendati di sistem kependudukan di daerah asal sudah tercatat, namun sejak dini perlu diberikan kepastian dalam menyalurkan hak pilih. Apalagi saat pemungutan suara belum bisa pulang ke kampung halaman guna memberikan hak suara.

Oleh karena itu, pendaftaran pemilih dan keberadaan TPS mandiri di Mu'allimin akan sangat menentukan penyaluran hak pilih.

"Kepedulian Mu'Allimin juga menjadi kepedulian terhadap keberlangsungan estafet kepemimpinan bangsa ini. Memilih para pemimpin bangsa kita itu menjadi penentu bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Integritas kebangsaan yang diwujudkan dalam ikut serta sukseskan Pemilu 2024 menjadi bagian dari semangat cinta tanah air Mu'Allimin," urainya.

Pihaknya juga mendorong siswanya yang bakal menjadi pemilih pemula agar cerdas dalam memilih peserta pemilu yang layak menjalankan sebuah pemerintahan. Sehingga siswa Mu'allimin tidak dianjurkan untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilu 2024 menjadi bagian edukasi kepada para siswa Mu'allimin dan membangun karakter tanggung jawab, semangat cinta tanah air, jujur, demokratis dan adil. **(Dhi)-f**

TASYAKURAN KANTOR BARU BAZNAS DIY Layanan Sistematis, Efektif dan Efisien

YOGYA (KR) - Pj Sekretaris Daerah DIY, Wiyos Santoso SE M Acc mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung pelayanan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Baznas DIY). Ia berharap, dengan menempati kantor baru harus diimbangi dengan pemberian layanan yang lebih sistematis, efektif dan efisien kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Pj Sekda DIY dalam sambutan yang dibacakan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Ir H Djarot Margiantoro pada Tasyakuran Kantor Baru Baznas DIY di Jalan Retno Dumilah 23c Pilahan Rejowinangun Kotagede, Selasa (21/3).

Pada kesempatan ini Pj Sekda DIY juga mengapresiasi kepada Baznas DIY, yang dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintah non-struktural, telah senantiasa menjaga komunikasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. "Ke depannya, mari kita tingkatkan kemitraan yang sudah dibangun selama ini. Mari kita saling mendukung, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta dalam upaya edukasi masyarakat terkait literasi zakat secara berkelanjutan, tentu sesuai dengan bidang urusan dan koridor kewenangan masing-masing," harapnya.

Tasyakuran ditandai pemotongan tumpeng oleh Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY H Djarot Margiantoro didampingi Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag DIY, H Nurhuda, yang diserahkan kepada Ketua Baznas DIY Dra Hj Puji Astuti MSi. Dilanjutkan pemotongan untaian bunga dan peninjauan ruang kerja dan pelayanan Baznas DIY.

H Puji Astuti menyampaikan, dengan acara tasyakuran ini pihaknya juga sekalian *kulonuwun* kepada warga sekitar karena menempati kantor baru. Harapannya bisa bekerjasama dengan segenap masyarakat secara baik. Pada kesempatan ini Puji Astuti juga menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar. **(Fie)-f**

IMPLEMENTASIKAN KURIKULUM MERDEKA SMAN 6 Yogya Kuatkan Profil Pelajar Pancasila



KR-Istimewa

Para siswa dan guru SMAN 6 Yogya saat mengikuti acara kegiatan P5Kenduri 2.

YOGYA (KR) - Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan salah satu ciri khas dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak

harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran.

"SMA Negeri 6 Yogyakarta sebagai salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka juga melaksanakan kegiatan P5. Kenduri #2 merupakan rangkaian akhir dari proses pembelajaran P5 dengan tema 'Gaya Hidup Berkelanjutan, dengan topik Zero Sampah'. Program ini memberikan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai pancasila kepada Siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta agar dapat mewujudkan aksi nyata peduli lingkungan," kata Kepala

SMAN 6 Hajarwati MPdSi di Yogyakarta, Kamis (23/3).

Dikatakan, dalam acara Kenduri #2 ini, siswa kelas 10 Fase E, berkesempatan memamerkan karya mereka selama proses pembelajaran P5. Adapun karya yang dibuat siswa harus sesuai dengan beberapa aspek yang ditentukan sekolah. Kantin tanpa plastik (Tintantik), daur ulang anorganik jadi musik (Dalang Asik). Daur ulang fashion anorganik, kertas dan plastik (Dalang Fantastik). Selain itu juga kerajinan dari sampah daur ulang (Keris Dalang). Residu akan jadi inovasi (Reaksi) dan komposting dan peduli limbah lingkungan (Kopling).

"Beberapa karya yang dipamerkan dalam kegiatan itu kuliner untuk mengulas aspek tintantik, fashion, kerajinan tangan, dan juga berbagai macam pupuk kompos. Selain itu pengunjung juga disuguhkan penampilan dari para siswa yang masuk ke dalam aspek dalang asik, sehingga suasana pameran terasa lebih meriah," ungkapnya. **(Ria)-f**

PERSIAPAN PPL PPG PRAJABATAN PPG UST Berkoordinasi dengan Kasek dan Guru Pamong



KR-Devid Permana

Koordinasi PPG UST dengan kepala sekolah dan guru pamong.

YOGYA (KR) - Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta mengadakan kegiatan Koordinasi Kepala Sekolah dan Guru Pamong Lapangan PPL PPG Prajabatan Gelombang 1 Semester 2 Tahun Akademik 2022/2023 di KJ Hotel Yogyakarta pada 16 Maret 2023.

Kaprodi PPG UST Dr Heri Maria Zulfiati MPd mengatakan, kegiatan ini mengundang para kepala sekolah (Kasek) dari 35 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta yang akan menjadi lokasi penerjunan para mahasiswa PPG UST melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). "Koordinasi ini lebih untuk penyesuaian persepsi antara PPG UST dengan kepala sekolah dan guru pamong mengenai teknis PPL sebelum mahasiswa PPG diterjunkan, agar pelaksanaan PPL di sekolah berjalan dengan lancar," terang Heri Maria. Hadir dalam acara Rektor UST Prof Pardimin PhD dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Wasidi SE MSi.

Menurut Heri, jumlah mahasiswa PPG Prajabatan Tahun 2022 sebanyak 190 peserta (6 kelas) untuk Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Para mahasiswa PPG Prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 baik dari jurusan kependidikan maupun nonkependidikan (fresh graduate)

yang belum mulai mengajar atau belum menjadi guru. "Jadi PPL ini sangat penting agar mahasiswa PPG Prajabatan nantinya menjadi guru profesional," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Heri Maria, kualitas pendidikan di PPG UST terus meningkat yang diikuti dengan tingginya tingkat kelulusan mahasiswa PPG UST. Hal ini menjadikan PPG UST semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek. Wakil Dekan 1 FKIP UST Setuju MPd mengatakan, tahun 2022 UST memperoleh hibah revitalisasi LPTK dari Ditjen GTK Kemdikbudristek terkait dengan peningkatan mutu Pendidikan Profesi Guru salah satunya adalah penambahan bidang studi, yang semula mengelola 7 bidang studi, ditambah 4 bidang studi lagi, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, bidang studi vokasi kolaboratif yaitu Teknik Grafika (Prodi PSR UST dengan ISI Yogyakarta) dan Pengendalian Produksi (Prodi PVTM-Teknik Industri UST). "Ini merupakan hibah revitalisasi LPTK yang ke-3 diperoleh FKIP UST dalam 4 tahun terakhir," katanya.

Rektor UST Prof Pardimin PhD berpesan agar persiapan PPL PPG Prajabatan Gelombang 1 Semester 2 Tahun Akademik 2022/2023 ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak kepala sekolah, guru pamong dan dinas. **(Dev)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

SUKSESKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Program JPD Siswa Jenjang SMA Perlu Penyesuaian

YOGYA (KR) - Sebagai kota pendidikan, Yogya dituntut mampu mempertahankan wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan pemerintah. Berkaitan dengan terbitnya Keputusan Gubernur DIY terkait besaran minimal biaya operasional pendidikan jenjang SMA/SMK, maka program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogya juga perlu disesuaikan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya yang duduk di Komisi D Dwi Saryono, mengungkapkan pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK saat ini memang sudah dipegang sepenuhnya oleh provinsi. Akan tetapi satu sisi Pemkot Yogya tidak bisa lepas tangan berkaitan dengan wajib belajar 12 tahun.

"Terutama menyangkut penduduk Kota Yogya yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA atau SMK negeri. Jaminan pendidikan bagi mereka perlu untuk disesuaikan merujuk adanya Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2023 tersebut," tandasnya.

Dalam Keputusan Gubernur

DWI SARYONO Fraksi PDI Perjuangan



KR-Ardhi Wahdan

DIY Nomor 20/KEP/2023 diputuskan besaran minimal biaya operasional pendidikan jenjang SMA negeri untuk kelas IPA ialah Rp 4.900.000 dan kelas IPS Rp 4.800.000. Sementara jenjang SMK negeri kelas teknik sebesar Rp 5.500.000 dan non teknik Rp 5.100.000. Besaran biaya operasional tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung per siswa per tahun.

Dwi Saryono menilai, sejauh ini jaminan pendidikan daerah yang digulirkan Pemkot Yogya mampu menjadi penjamin terhadap keberlangsungan pendidikan bagi penduduk Kota Yogya. Alokasi anggaran yang disediakan juga cukup besar dan langsung masuk ke dalam rekening sekolah. Oleh karena itu, setiap aturan baru berkaitan dengan hak pendidikan maka Kota Yogya harus mampu bergerak cepat dalam melakukan penyesuaian.

"Kalau tidak disesuaikan klausulnya, maka nanti beban masyarakat bisa semakin berat. Apalagi jika sebelumnya sudah tercover tetapi ternyata masih ada yang tercecer," imbuhnya.

Diakuinya, urusan pendidikan memang harus ada sharing antara pemerintah dengan keluarga atau masyarakat. Namun demikian, program wajib belajar 12 tahun sudah menjadi komitmen bersama yang harus dipertahankan. Keputusan dari Gubernur DIY itu pun dipastikan sudah mempertimbangkan kondisi kebutuhan terkini guna mengejar kualitas pendidikan di sekolah negeri. **(Dhi)-f**